

**PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK
WARIS BAGI ISTERI YANG TELAH
HABIS MASA IDDAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh:

**JASMIATI
10921006549**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK WARIS BAGI ISTERI YANG TELAH HABIS MASA IDDAH”**

Seiring dengan itu shalawat serta salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliaan kepada alam yang penuh berkah, hidayah dan ilmu pengetahuan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Hajar. M, M.Hum selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, dimana dengan bimbingan beliau maka penulisan ini dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan, dengan begitu penulis berdo’a semoga beliau mendapat imbalan dari Allah SWT., amin.

Dengan selesainya penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda alm. Bakri, semoga beliau diterima di sisi Allah SWT. dan bunda tercinta, yaitu Ibunda Nur’aini yang telah banyak berkorban demi kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. DR. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staff.

3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Prof. DR. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd beserta Staff FASIH Riau.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili M.Ag, dan Bapak Zainal Arifin M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, kesabaran dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak DR. Hajar Hasan, MA selaku Penasehat Akademis, yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama perkuliahan dan membantu memberikan arahan serta bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama Perkuliahan.
7. Roni Chandra (Abang), dan Yuhana S.Pd (Kakak) yang dengan tulus ikhlas membiayai sebagian biaya pendidikan adinda.
8. Adik tercinta, yaitu Sutriana dan Rika Purnama Sari yang telah banyak menyumbangkan bantuan moril maupun materil, juga do'a- do'anya yang selalu diselipkan di setiap shalatnya untuk ku dan untuk kesuksesanku hari ini.
9. Keponakan Soeryadi Ilham, Wahyu Ardana, Fajar Chandra Kirana, Dzakira Henriana, yang selalu mendukung penulis dalam berbagai hal untuk suksesnya penelitian ini.

10. Rekan-rekan Ahwal Al-Syaksiyyah lokal 1 dan 2, dan ucapan terimakasih juga kepada Asmilawati S.Psi, Ade Siti Rohimah S.Pd, Firdawati, Nurhasanah, Afriani, Meliza, dan masih banyak lagi yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam memberikan ide-ide untuk penulisan karya ilmiah ini.
11. Spesial Ahmadi S.Pd., yang tak pernah bosan memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
12. Buat teman-teman KKN yang bertempat di Kampung Panjang RW.01 Kec. Kampar Utara (Air Tiris) yang telah memberikan semangat dan motivasi pada penulis.
13. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang turut serta membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Juli 2013

Penulis

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK WARIS BAGI ISTERI YANG TELAH HABIS MASA IDDAH”** ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, karena sebelum kematian suami, talak yang dijatuhkan sudah talak *ba’in* sehingga hak mewarisi diantara keduanya menjadi hilang, isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya selama ia masih dalam masa iddah, jika masa iddah sudah berakhir isteri tidak dapat lagi mewarisi harta peninggalan mantan suaminya. Adapun menurut Imam Malik isteri yang telah habis masa iddah tetap mendapatkan hak waris dari suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan iddah wafat atau iddah talak pada isterinya.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi istri yang telah habis masa iddah dan tinjauan menurut hukum kewarisan Islam terhadap pemikiran Imam Malik.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan buku Imam Malik yang berjudul *“al-Muwaththa’* dan *al-Mudawwanah al-Kubra* sebagai rujukan bahan hukum primernya, sedangkan bahan hukum skundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan Metode Deskriptif dan Yuridis Normatif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah, yaitu mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta yang diperoleh selama penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Bersifat Yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pemikiran Imam Malik, terhadap hak waris bagi istri yang telah habis masa iddah, yaitu mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang diistinbatkan atau ditetapkan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

Menurut pemikiran Imam Malik, bahwa isteri yang sudah habis masa iddah tetap mendapat hak waris dari suami yang telah menceraikannya. Adapun alasannya, disebabkan bila isteri yang telah ditalak oleh suami dan telah habis masa iddah kemudian ia tidak mendapatkan hak waris maka dikhawatirkan nanti bekas isteri tersebut hidupnya akan menderita dan sengsara, hal ini juga berdasarkan kasus talak dalam keadaan sakit yang diselesaikan oleh Utsman bin Affan yakni kasus yang menyangkut isteri Abdurrahman bin Auf, serta agar suami tidak menceraikan isterinya diwaktu suami sakit karena dikawatirkan adanya unsur kesengajaan dari suami ketika hendak mentalak isteri agar isteri tersebut tidak mendapat hak waris.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Pikir.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Sumber Hukum.....	15
B. Keutamaan dan Hijab	22
C. Hak-hak Ahli Waris	29
BAB III IMAM MALIK DAN PEMIKIRANNYA	
A. Biografi.....	42
B. Pendidikan dan Karya	46
C. Pemikiran Imam Malik.....	51
BAB IV HAK ISTERI YANG HABIS MASA IDDAH MENURUT IMAM MALIK	
A. Pemikiran Imam Malik.....	60

	B. Hak Waris Isteri Yang Habis Masa Iddah.....	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
BIOGRAFI PENULIS		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan¹.

Hubungan kekerabatan ialah orang yang mempunyai hubungan kerabat melalui nasab (sedarah)². Sebab memperoleh hak kewarisan yang paling terkuat adalah hubungan kekerabatan, karena kekerabatan termasuk unsur *causalitas* seseorang yang tidak dapat dihilangkan pada diri seseorang³.

Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut keluar dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya bahwa diantara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan⁴.

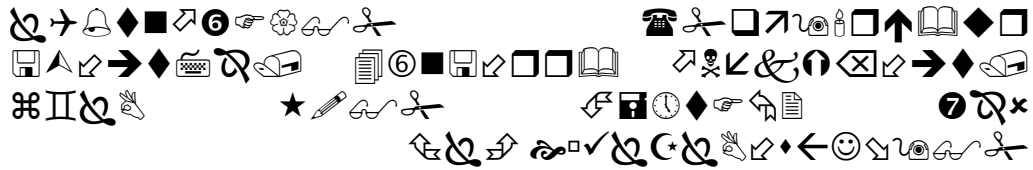
Hubungan kekerabatan menjadi sebab hubungan kewarisan ditegaskan oleh Allah pada Qs. Al-Ahzab (33) : ayat 6

17 ¹ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008), h.

² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 564

³ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1975), h. 116

⁴ Hajar M, *Op. Cit*, h. 27



Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmim”⁵.

Hubungan perkawinan yang dimaksud adalah dapat saling waris-mewarisi antara suami isteri yang masih dalam ikatan perkawinan⁶.

Ikatan perkawinan sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan itu berlangsung sejak akad yang berupa ijab dan kabul tersebut mulai diucapkan sampai dengan saat diputuskannya pemutusan akad⁷. Dengan demikian suami dapat menjadi ahli waris bagi isteri, dan isteri dapat pula menjadi ahli waris bagi suami⁸. Adanya hak kewarisan yang disebabkan oleh perkawinan ditegaskan oleh Allah pada Qs. An Nisa' (4) : ayat 12.

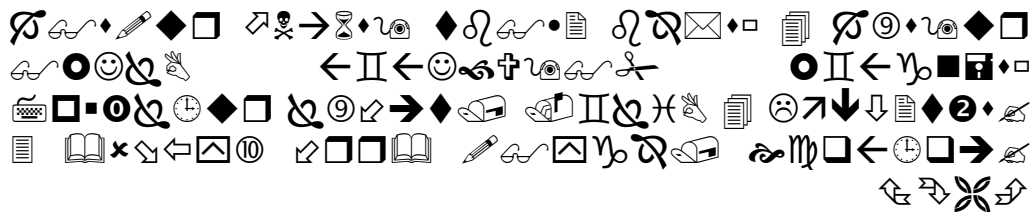


⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul Ali Art (J-ART), 2005, h. 6

⁶ A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.27

⁷ Fathur Rahman, *Op.Cit*, h. 20

⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 62



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu” .

Suatu perkawinan dianggap utuh apabila perkawinan itu dalam status talak *raj'i*, yang masih masa iddah. Hal inilah yang disebut dengan perkawinan yang utuh, karena disaat iddah masih berjalan, seorang suami masih mempunyai hak yang penuh untuk meruju' kembali bekas isterinya yang masih menjalankan masa iddah.⁹

Dengan demikian hak antara suami dan isteri untuk saling waris-mewarisi tidak hilang. Bila suami meninggal, dengan meninggalkan isteri yang sedang menjalani masa iddah *raj'i* maka istri masih mendapat hak waris atas harta peninggalan suami, demikian sebaliknya¹⁰.

Lain halnya dengan talak *ba'in* yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan sejak talak dijatuhkan. Ketika isteri sedang menjalani masa iddah *bai'in* suami tidak diperkenankan untuk merujuk kembali isterinya seperti halnya talak *raj'i*, karena ikatan perkawinan telah putus sejak talak dijatuhkan.

⁹ Fathur Rahman, *Op. Cit*, h. 115

¹⁰ *Ibid.*

Bila salah seorang diantara mereka meninggal, maka hak waris-mewarisi diantara keduanya menjadi terputus, baik meninggalnya ketika masa iddah masih berlangsung maupun ketika masa iddah telah berakhir¹¹.

Adapun menurut Imam Malik bahwasannya isteri yang sudah habis masa iddah tetap mendapatkan hak waris dari suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan iddah wafat.

Pernyataan Imam Malik tersebut sebagai berikut:

وَأِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ فَهَلْكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا عِدَّةٌ عَلَيْهَا مِنَ الْوَفَاةِ¹²

“Dan jika iddah talak perempuan tersebut telah selesai, lalu laki-laki tersebut meninggal saat itu juga (setelah iddah perempuan yang ditalaknya tersebut telah selesai) maka perempuan tersebut punya hak waris dan tidak ada iddah wafat baginya.”

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, karena sebelum kematian suami talak yang dijatuhkan sudah talak *ba'in* sehingga hak mewarisi diantara keduanya menjadi putus¹³. Imam Hanafi berpendapat, isteri dapat mewarisi harta peninggalan mantan suaminya selama ia masih dalam masa iddah, jika masa

¹¹*Ibid.*

¹² Imam Malik Bin Anas, *Al-Mudawwanatul Qubro*, (Beirut: Darul Kitab al- Alamiyah, tt), Juz II h. 86

¹³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhatashar Kitab AL Umm fi Al Fiqh*, Penerjemah oleh: Muhammad Yasir dan Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 533

iddah sudah berakhir isteri tidak dapat lagi mewarisi harta peninggalan mantan suaminya¹⁴.

Berdasarkan dari pendapat diatas adanya perbedaan pendapat antara para fuqaha dengan Imam Malik. Para fuqaha berpendapat bahwa isteri yang diceraikan dengan talak *ba'in* tidak berhak menerima warisan. Hal ini dikarenakan hubungan mereka sebagai suami isteri telah terputus, maka secara otomatis hak kewarisan diantara keduanya akan terputus pula.

Sedangkan dalam hal ini Imam Malik berbeda pendapat, bahwa isteri dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, baik ketika suami meninggal dunia isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah berakhir masa iddah, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain ataupun belum.

Bertolak dari pemaparan diatas, penulis tertarik dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa ada hak waris isteri walaupun telah habis masa iddah. Maka penulis menuangkannya dalam sebuah judul penelitian yang berjudul: **“PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK WARIS BAGI ISTERI YANG TELAH HABIS MASA IDDAH”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah?
- b. Bagaimana pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah menurut hukum kewarisan Islam?

¹⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas al- Azhar (Mesir), *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 38

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah menurut hukum kewarisan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa terlebih kepada masyarakat, tentang pemikiran Imam Malik yang mengatakan hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada fakultas syariah dan ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Kerangka Pikir

1. Teori Syahadat

Teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua *kalimat* syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syadatnya itu. Teori ini dirumuskan oleh al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang dimaksud antara lain: Surat ke-1 ayat 5; Surat ke-2 ayat 179; Surat ke-3 ayat 7; Surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105; Surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50; Surat ke-24 ayat 51 dan 52.

Teori syahadat ini merupakan lanjutan dari prinsip ketauhidan dan filsafat hukum islam¹⁵.

Teori syahadat menganjurkan seseorang untuk patuh terhadap hukum yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori ini ialah kesaksian untuk menjadi seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat *syahadah*¹⁶.

Teori *syahadah* yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini ialah bersifat umum. Terdapat pula asas-asas secara khusus yang merupakan lanjutan dari prinsip umum dalam setiap bidang-bidang hukum Islam. Salah satu diantara bidang hukum tersebut ialah Hukum Kewarisan Islam¹⁷.

Secara keseluruhan, hukum kewarisan Islam wajib dilaksanakan. Kata “*Yushikum Allah*” berarti mensyari’atkan atau memerintahkan. Hal yang lebih penting lagi, al-Qur’an (4: 13 dan 14) menyatakan bahwa barang siapa yang mentaati undang-undang Allah, akan dimasukkan ke syurga dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang yang mengingkari atau melanggar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya¹⁸.

2. Teori keadilan

¹⁵ Jahaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syari’ah IAILM- Suryalaya, 2009), h. 69

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 269

¹⁷ Hajar M, *Op. Cit*, h. 10

¹⁸ *Ibid*, h. 11

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan yang akan diperlukan dan digunakan¹⁹. Bagi syari'at Islam semua orang dipandang sama, dengan tidak ada suatu kelebihan antara satu sama lain. Baik karena keturunan, kekayaan, atau karena pangkat²⁰.

Secara prinsip dapat pula dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan, sama halnya dengan perempuan. Secara rinci disebutkan pada ayat 11, 12, maupun 176 surat an-Nisa. Ketiga ayat tersebut mengatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berhak mewarisi, adanya hak suami dan isteri, maupun hak saudara, baik saudara itu laki-laki, perempuan atau hubungan kandung, seayah dan seibu²¹.

3. Teori ahli waris

Ahli waris ialah suatu teori yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam untuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris atau disebut juga dengan *warits* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal²².

¹⁹ *Ibid*, h. 15

²⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h. 34

²¹ Hajar M, *Op. Cit*, h. 15

²² Amir Syrifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 210-211

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.²³ Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan²⁴.

Ahli waris hubungan darah ini ditentukan pada saat peristiwa kelahiran, sedangkan ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan berlangsungnya akad nikah yang sah²⁵.

4. Teori hubungan ahli waris

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan.

Ahli waris hubungan darah terbagi atas empat macam kategori, yakni: garis keturunan "*bunuwah*", leluhur "*ubuwh*", kesamping pertama "*ukhuwah*", dan garis kesamping kedua "*umumah*"²⁶.

Garis keturunan *bunuwah* terdiri atas: anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11. Cucu, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan²⁷.

Garis keturunan leluhur *ubuwh* terdiri atas: ayah dan ibu, dasar hukumnya berdasarkan dari surat an-Nisa' ayat 11²⁸. Selanjutnya kakek²⁹.

²³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h.56

²⁴ Hajar M, *Op.Cit*, h. 17

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 211

²⁶ Hajar M, *Op.Cit*, h. 67

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 74

Dan nenek, dasar hukumnya dapat pula dipahami dengan memahami perluasan dari pengertian *umm* pada surat an-Nisa' ayat 11 dan juga terdapat dalam hadits.³⁰

Ahli waris (*ukhuwah*) hubungan kesamping pertama terdiri atas: Saudara, baik itu saudara laki-laki maupun saudara perempuan, sekandung, seayah, maupun seibu. Hubungan dasar hukumnya yaitu pada surat an-Nisa' ayat 12 dan 176. Anak saudara, anak saudara secara jelas tidak dapat hak kewarisannya baik didalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Adanya hak kewarisan anak saudara itu didasarkan kepada perluasan pengertian dari saudara yang haknya dijelaskan didalam al-Qur'an, dengan alasan apabila saudara tidak ada, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Dan anak saudara itu belum akan mendapatkan haknya selama ayahnya yang menghubungkannya kepada pewaris masih hidup.³¹

Ahli waris (*ummumah*) garis kesamping kedua terdiri atas: paman, berdasarkan hasil *ijtihad* para ulama. Anak paman, bahwa anak paman ini diperoleh dari perluasan pengertian paman. Dengan begitu yang disebut dengan anak paman adalah anak dari paman yang hubungannya hanya dengan ayah, itupun yang kandung atau seayah dari ayah, sedangkan anak yang dimaksudkan disini adalah anak laki-laki.³²

²⁸ Hajar M, *Op.Cit*, h. 33

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 74

³⁰ Hajar M, *Op.Cit*, h. 34

³¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 218

³² *Ibid*.

Adapun ahli waris yang disebabkan hubungan perkawinan adalah suami dan isteri. Suami menjadi ahli waris dari isteri yang meninggal dunia, dan begitu pula sebaliknya, isteri menjadi ahli waris dari suami yang meninggal dunia. Adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak menyebabkan munculnya hak kewarisan terhadap kerabat suami atau kerabat isteri³³.

Adapun kerabat lain yang termasuk ahli waris adalah *Dzawil Arham*. Yang dimaksud dengan ahli waris *Dzawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai *Dzawil furudh* dan tidak pula dalam kelompok *asabah*. Bila kerabat yang menjadi *asabah* adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *Dzawil arham* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan³⁴.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan³⁵. Dalam hal ini penulis

³³ Hajar M, *Op.Cit*, h. 34

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. 1, h. 168-169

³⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 78

memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan *Conseptual* dengan cara meneliti hasil pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari data skunder. Data skunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier³⁶.

Bahan hukum primer, berupa: Buku *al-Muwathaha'*, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Imam Malik bin Anas). Dilengkapi juga dengan bahan- bahan skunder berupa buku-buku, diantaranya sebagai berikut: Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata), Hukum Kewarisan Islam (Idris Ramulyo), Kewarisan dalam al-Qur'an (Ali Parman), Hukum Kewarisan Islam / Fiqih Mawaris (Hajar M). Serta bahan hukum tersiernya yakni Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia (Ahmad Warson Munawwir) dan lain-lain.

4. Tehnik Analisa Data

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinnjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12-14

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah deskriptif dan yuridis normatif, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri.

Teknik menggunakan analisa deskriptif karena bersifat menggambarkan apa adanya dan mendeskripsikan pemikiran Imam Malik terhadap hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah. yang mana pemikirannya tersebut, tampak adanya pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam. Dan teknik menggunakan analisa yuridis normatif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum dan mengaitkan dengan norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skirpisi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Pembahasan, Tinjauan umum tentang ahli waris menurut hukum Islam berupa, Pengertian dan Sumber hukum, Keutamaan dan Hijab, dan Hak-hak ahli waris.

Bab Ketiga Imam Malik dan pemikirannya, Biografi, Pendidikan dan Karya, dan Pemikiran Imam Malik.

Bab Keempat Pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah, meliputi: Pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah, dan Pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah menurut hukum kewarisan Islam.

Bab Kelima Kesimpulan dan Saran.

BAB II

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Sumber Hukum

1. Pengertian

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.³⁷ Sementara menurut defenisi lain, sebagai berikut:

Muhammad Amin Suma, mendefenisikan ahli waris adalah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada simayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan³⁸.

Menurut Idris Ramulyo, mendefinisikan ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris)³⁹.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris⁴⁰.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h.56

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103

⁴⁰ Seri perundang-undangan, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 117

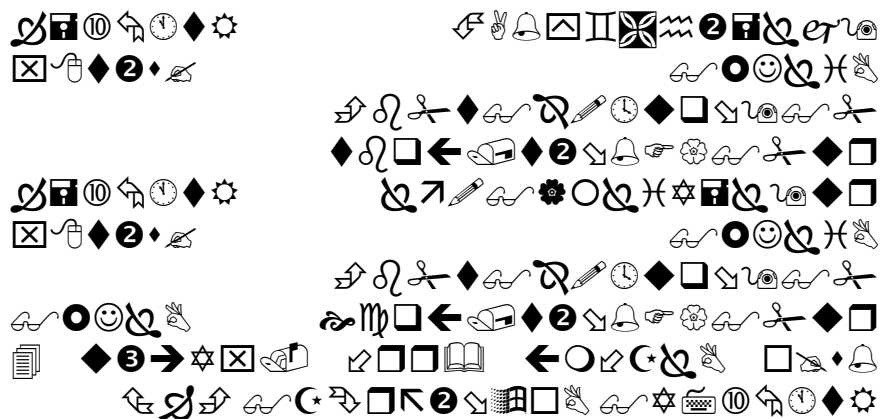
Dari pemaparan tersebut diatas dapat pula disimpulkan bahwa, ahli waris adalah seseorang atau sekumpulam orang yang ada hubungan kerabat atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia dan tidak ada suatu sebab hukum yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.

2. Sumber-Sumber Hukum

Dasar utama hukum kewarisan Islam ialah nash-nash yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.

a. Nash-nash al- Qur'an antara lain:

1. Qs. *an- Nisa'* (4):7



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁴¹

2. Qs. *An- Nisa'* (4): 8



⁴¹ Departemen Agama RI , *Op.cit*, h. 79

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴³

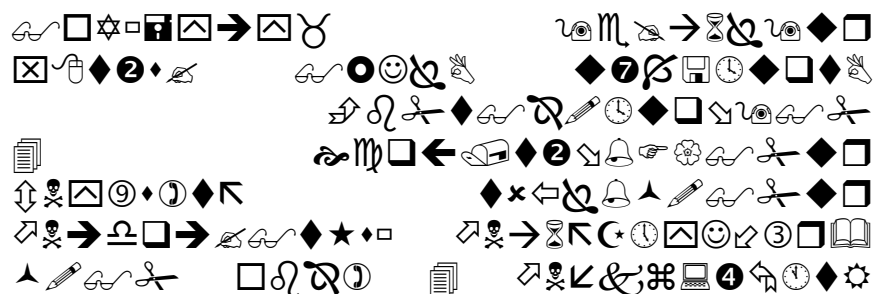
4. Qs. An-Nisa' (4): 12

⁴³ Ibid.



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.⁴⁴

5. Qs. An-Nisa' (4): 33



⁴⁴ Ibid. h. 80

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁴⁵

6. Qs. *an-Nisa'* (4): 176

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang

⁴⁵ *Ibid.* h. 84

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴⁶

b. Hadits Nabi, antara lain:

1. Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat al-Bukhari, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّو الْفَرِثُضَ بَأَ هَلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (متفق عليه)⁴⁷

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa beliau berkata: “Rasulullah Saw. Bersabda: berikan harta pusaka kepada pemiliknya (orang yang menerima *fardlu*). Sisa dari hartanya, diberikaan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal”.

2. Hadits dari Ma'ql bin Yasar menurut riwayat, Abu Daud, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدِّكَ كَانَ فِينَا بِالْأُسْدِ س.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.* h. 107

⁴⁷ Al-Bukhari, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, alih Bahasa: Zainudin Ahmad az-Zubaidi, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), Jilid 2, h. 712

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa: Ahmad Taufik Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 541

Artinya: dari Ma'ql bin Yasar, ia berkata, Rasulullah SAW menetapkan hukum harta warisan bagi seorang kakek yang ada pada kita sebesar sperenam.

3. Hadits dari Abu Hurairah ra. Menurut riwayat Ibn Majah dan Abu Daud, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.⁴⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: seorang pembunuh tidak mewarisi.

4. Hadits dari Huzail bin Syurahbil menurut riwayat kelompok perawi hadits selain muslim, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ الْهَزِيلِ بْنِ شُرَّاحِبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلَّمَ أَنَّ بِنَ رَيْعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لَأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالَا: لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وَأَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَآخِرُهُ بِمَا قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأَبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.⁵⁰

Artinya: Dari Al Huzail bin Syurahbil, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Abu Musa Al-Asy'aridan Salman bin Rabi'ah Al Bahili lalu ia bertanya pada keduanya mengenai harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung? Keduanya menjawab, “anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan simayit. Temuilah Ibn Mas'ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kita. Laki-laki tadi datang menemui Ibn Mas'ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Abdullah berkata, Aku telah sesat jika demikian, aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu:

⁴⁹ Ibid. h. 547

⁵⁰ Ibid, h. 541

anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan bagian dua.

5. Hadits dari Ali Bin Abi Thalib yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيُنَنَا بَنِي
الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ, يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَيِّهِ وَأُمَّهُ دُونَ أَخَوَتِهِ لِأَيِّهِ

51.

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW menetapkan hukum bahwa saudara seibu saling mendapatkan warisan bukan saudara seapak, seorang laki-laki dapat memberikan warisan kepada saudara kandungnya bukan saudara seapak saja.

B. Keutamaan dan Hijab

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya anak lebih dekat dibandingkan dengan cucu, begitu pula ayah lebih dekat kepada si anak dibandingkan dengan saudara, karena hubungan anak kepada ayah secara langsung sedangkan saudara kepada saudaranya (si anak) adalah melalui ayah. Keutamaan itu dapat pula disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan. Umpamanya saudara kandung lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu, karena saudara kandung mempunyai dua garis kekerabatan yaitu

⁵¹ *Ibid.* h. 549

melalui ayah dan ibu, sedangkan saudara seayah hanya melalui garis ayah dan saudara seibu hanya melalui garis ibu⁵².

Dalam hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan dari pada garis hubungan kekerabatan. Oleh karena itu anak dalam garis keturunan kebawah tidak lebih utama dari ayah dalam garis keturunan keatas, karena kedua belah pihak mempunyai jarak hubungan yang sama⁵³.

Adanya keutamaan dalam hubungan kekerabatan berpengaruh dalam hak menerima warisan, dengan arti ahli waris yang lebih utama lebih berhak menerima warisan dibandingkan dengan kerabat yang lebih jauh derajat kerabatnya. Seseorang yang hubungan kerabatnya lebih jauh, baru berhak mendapat warisan bila yang lebih utama sudah tidak ada⁵⁴.

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti hukum kewarisan Islam mengenal adanya lembaga hijab⁵⁵.

Hijab secara bahasa (etimologi) berarti *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama dari padanya, karena itu haknya tertutup⁵⁶.

⁵² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 47

⁵³ *Ibid*, 48

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ Hajar M, *Op.Cit*, 27

⁵⁶ Moh. Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 80

Adapun ahli waris yang ditutup hak pusaknya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut dengan *mahjub*⁵⁷.

Orang yang terhibab tidak berhak menerima harta warisan, sama halnya dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak berhak mendapat warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Orang yang terhibab disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih utama⁵⁸.

Seseorang yang terhibab dianggap tidak ada, sehingga tidak berpengaruh kepada ahli waris lain. Sedangkan ahli waris yang terhibab tetap berstatus sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris yang terhalang tidak dapat disebut ahli waris⁵⁹.

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqshan*.

- a. *Hijab hirman*, yaitu, tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup (hilang) haknya jika yang meninggal dunia itu meninggalkan anak atau cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki-laki yang meninggal dunia.

Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (*hijab*) haknya (kecuali jika ada penghalang) yaitu:

1. Suami atau istri
2. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan
3. Ayah

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hajar M, *Op.Cit*, 27

⁵⁹ *Ibid.*

4. Ibu

Agar lebih jelas, ahli waris yang menjadi *mahjub* karena adanya *hijab hirman*, yaitu sebagai berikut:

1. Kakek *mahjub* oleh bapak
2. Nenek garis ibu *mahjub* oleh ibu
3. Nenek garis bapak *mahjub* oleh bapak
4. Cucu laki-laki *mahjub* oleh anak laki-laki
5. Cucu perempuan *mahjub* oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki).
6. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) *mahjub* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak.
7. Saudara seapak laki-laki atau perempuan *mahjub* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Saudara kandung
 - e. Saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu perempuan.
8. Saudara seibu laki-laki atau perempuan *mahjub* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Datuk
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seapak
 - g. Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*.
10. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Datuk
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seapak
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - h. Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*
11. Paman sekandung *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Bapak

- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki sebapak
- g. Anak laki-laki saudara kandung
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- i. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*.

12. Paman sebapak *mahjub* oleh:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki sebapak
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- h. Annak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Paman sekandung (dengan bapak)
- j. Paman sebapak
- k. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*.

13. Anak laki-laki dari paman sekandung *mahjub* oleh:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki

- c. Bapak
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Anak laki-laki dari saudara sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
 - i. Paman sekandung
 - j. Paman sebapak
 - k. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*
 - l. Anak laki-laki dari paman sebapak *mahjub* oleh sebelas orang tersebut diatas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung⁶⁰.
- b. *Hijab Nuqshan*, yaitu bergesernya hak seorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, yakni sebagai berikut:
- 1. Suami, jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari 1/2 menjadi 1/4 warisan.

⁶⁰ Moh. Muhibbin. Abdul Wahid, *Op.Cit*, h. 81-84

2. Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini bergeser $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.
3. Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ harta warisan.
4. Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada dua orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.
5. Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan kandung ada dua orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya⁶¹.

C. Hak-hak Ahli Waris

Adapun faktor yang menyebabkan hubungan kewarisan adalah: adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan. Hubungan ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran⁶².

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara

⁶¹ *Ibid*, h. 80-81

⁶² Hajar M, *Op. Cit*, h. 17

keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran⁶³.

Selain hubungan kekerabatan, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan oleh hubungan perkawinan. Ayat 12 surat an-Nisa' menyatakan adanya kewarisan suami dan isteri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan isteri didasarkan kepada dua ketentuan. *Pertama*, bahwa antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah⁶⁴. Ketentuan *kedua*, bahwa antara suami dan isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak.⁶⁵

Adapun ahli waris dan hak-hak yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris *Dzawil Furudl*

- a. Yang berhak mendapatkan bagian setengah (1/2) dari harta warisan adalah:

1. Suami, yaitu apabila istri yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, maupun perempuan.
2. Anak perempuan tunggal, atau tidak mempunyai saudara yang lain.
3. Anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu jika tidak memiliki anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang perolehan warisan (*mahjub*).

⁶³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 28

⁶⁴ *Ibid*, h. 22

⁶⁵ Hajar M, *Op.Cit*, h. 22

4. Saudara perempuan kandung, yaitu ketika dia seorang diri serta tidak ada orang yang menghalanginya
- b. Yang berhak mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) dari harta warisan adalah:
 1. Suami, jika istri yang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki atau perempuan dan atau, meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan
 2. Isteri atau beberapa isteri (tidak lebih dari empat orang), jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak (laki-laki atau perempuan), atau tidak juga anak dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan)
- c. Yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$) dari harta warisan adalah:
 1. Isteri atau beberapa isteri (tidak lebih dari empat orang), jika suaminya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak (laki-laki atau perempuan), atau anak dari anak laki-laki (laki-laki atau perempuan)
- d. Yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$) dari harta warisan adalah:
 1. Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki

2. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang dari perolehan warisan (*mahjub*)
 3. Dua orang saudara perempuan kandung (seibu seapak) atau lebih, yaitu jika tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya.
 4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, yaitu ketika tidak ada saudara perempuan kandung serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang perolehan warisan (*mahjub*)
- e. Yang berhak mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari harta warisan adalah:
1. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan
 2. Dua saudara atau lebih yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada orang lain yang berhak menerima.
- f. Yang berhak memperoleh seperenam ($1/6$) dari harta warisan adalah:
1. Ayah si mayit, jika yang meninggal tersebut mempunyai anak atau anak dari anak laki-lakinya
 2. Ibu, jika ia mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara kandung atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan yang seibu seayah, seayah saja, atau seibu saja.

3. Kakek (ayah dari ayah), yaitu jika beserta anak atau anakdari anak laki-laki, dan tidak ada ayah
4. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), jika tidak ada ibu
5. Satu orang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) atau lebih, yaitu ketika bersama-sama dengan seorang anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya (*mahjub*)
6. Saudara perempuan yang seapak. Yaitu, yaitu ketika bersama-sama dengan saudara perempuan yang seibu seayah (kandung), serta tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya
7. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, yaitu jika tidak ada (*hijab*) yang menghalanginya⁶⁶

2. Ahli waris *Ashabah*

Ahli waris *Asabah* yaitu bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima sisa, ahli waris *asabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furud*⁶⁷.

a. *Asabah bi nafsih*

Asabah bi nafsih itu seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki

⁶⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kuasar, 1998), h. 510-511

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 60

Anak laki-laki baik sendirian atau lebih, berhak atas seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang lain atau sisa harta setelah diberikan lebih dahulu hak ahli waris *furudl* yang berhak. Dengan adanya anak laki-laki sebagai *asabah*, maka ahli waris lain yang dapat mewarisi bersama anak laki-laki (sebagai *dzawil furudl*) yaitu ayah, ibu atau nenek, suami atau istri. Bila anak laki-laki terdiri dari beberapa orang, mereka berbagi sama banyak⁶⁸.

2. Cucu laki laki (melalui anak laki-laki)

Cucu laki-laki mewarisi sebagai ahli waris *asabah* bila anak sudah meninggal, baik anak itu adalah ayahnya atau saudara dari ayahnya. Kewarisan cucu laki-laki sama dengan kewarisan anak laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama dengan ahli waris yang dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan menutup orang yang ditutup oleh anak laki-laki.

3. Ayah

Ayah berkedudukan sebagai ahli waris *asabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Dengan kehadiran anak atau cucu laki-laki ayah hanya akan menerima sebagai *dzawil furudl* sebesar 1/6. Ahli waris yang dapat mewarisi bersama ayah sebagai *dzawil furudl* adalah anak perempuan, ibu, suami atau istri.

4. Kakek

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 233

Kakek berkedudukan sebagai ahli waris *asabah* bila dalam susunan ahli waris tidak ada anak atau cucu laki-laki dan tidak ada pula ayah. Pada umumnya kewarisan kakek sama dengan ayah, karena hak kewarisan kakek merupakan perluasan dari pengertian ayah. Oleh karena itu, kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah bila ayah sudah meninggal lebih dahulu, baik sebagai ahli waris *furudl*, atau *asabah*, ia akan menutup orang-orang yang ditutup oleh ayah dan dapat mewaris dengan orang-orang yang dapat mewarisi bersama ayah.

5. Saudara kandung laki-laki

Saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris *asabah* bila ia tidak mewarisi bersama anak atau cucu laki-laki dan tidak juga ayah.

6. Saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki seayah berkedudukan sebagai *asabah*, dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara kandung laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan, dan saudara kandung perempuan dan saudara seayah perempuan yang bersama menjadi *asabah bi ghairihi* dengan saudara seayah laki-laki⁶⁹.

7. Anak saudara kandung laki-laki

⁶⁹ *Ibid.* h. 238

Anak saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris *asabah* bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara kandung laki-laki dan saudara seayah laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung, atau seayah, ibu atau nenek, suami atau isteri, saudara seibu laki-laki atau perempuan. Kewarisan anak atau saudara kandung laki-laki adalah sebagaimana kewarisan saudara kandung laki-laki dalam segala bentuknya.

8. Anak saudara seayah laki-laki

Anak saudara seayah laki-laki hanya dapat menjadi ahli waris *asabah* bila ia tidak mewarisi bersamanya anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah dan anak saudara laki-laki kandung. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan kandung atau seayah, suami atau isteri, saudara seibu laki-laki atau perempuan.

9. Paman kandung

Paman kandung ialah saudara kandung dari ayah. Paman kandung menjadi ahli waris *asabah* bila saat mewarisi tidak ada: anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara kandung atau seayah. Ia dapat bersama-sama mewarisi dengan anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami atau isteri.

Bila ahli waris hanyalah paman sendirian, maka ia mengambil semua harta dan bila ia bersama dengan ahli waris lain yang berhak ia mengambil sisa harta sesudah dibagikan hak ahli waris *furudl*. Kalau ia ada beberapa orang mereka berbagi sama banyak.

10. Paman seayah

Paman seayah adalah saudara seayah dari ayah. Ia berhak atas warisan secara *asabah* bila sudah tidak ada diantara ahli waris itu anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah dan paman kandung. Paman seayah dapat mewarisi bersama-sama dengan anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara perempuan kandung atau seayah, saudara seibu laki-laki atau perempuan.

Bila sendirian ia menerima seluruh harta dan bila ia bersama dengan ahli waris lain secara *furudl*, maka ia mengambil sisa hartam sesudah dibagikan kepada ahli waris *furudl*. Bila ia beberapa orang maka ia berbagi sama banyak.

11. Anak paman kandung

Anak paman kandung menjadi ahli waris secara *asabah* bila sudah tidak ada anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki saudara kandung atau seayah, paman kandung atau seayah. Ia dapat mewarisi bersama

anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami atau istri.

Bila ia sendiri ia dapat mengambil semua harta, sedangkan bila ia bersama lainnya yang berhak ia mengambil sisa harta sesudah dibagikan kepada ahli waris. Bila ia ada beberapa orang maka ia dibagi sama banyak.

12. Anak paman seayah

Anak paman seayah mewarisi secara *asabah* bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak saudara laki-laki kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, dan anak paman kandung pewaris bersamanya. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami atau istri. Bila ia seorang diri maka ia dapat mengambil semua harta warisan tersebut dan sedangkan ia bersama ahli waris lainnya ia mengambil sisa harta dan bila ia ada beberapa orang mereka berbagi sama banyak⁷⁰.

b. *Asabah Bil Ghairihi*

Yang berhak menjadi ahli waris *asabah bil ghairihi* adalah:

1. Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Bila ahli waris hanya mereka berdua,

⁷⁰ *Ibid*, h. 238-243

keduanya mengambil semua harta dan bila ada ahli waris yang lain mereka mendapat sisa harta.

2. Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki. Cucu perempuan itu dapat menjadi *asabah* oleh laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berada satu tingkat dibawahnya. Kalau ahli waris hanya mereka saja, maka mereka berhak atas seluruh harta, sedangkan kalau bersama mereka ada ahli waris *furudl*, mereka mengambil sisa harta sesudah pembagian *dzawil furudl*.

3. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung

Saudara perempuan kandung menjadi *asabah* karena keberadaan saudara laki-laki kandung (saudara laki-lakinya) saat mewarisi harta. Bila ahli waris hanya mereka saja, keduanya mengambil semua harta dan bila ada ahli waris lain bersamanya, mereka mengambil sisa harta yang tinggal.

4. Saudara seayah perempuan bersama saudara seayah laki-laki

Saudara seayah perempuan menjadi ahli waris *asabah* bila diajak menjadi *asabah* oleh saudaranya yang laki-laki. Ia mengambil seluruh harta bila ahli waris yang berhak hanyalah mereka berdua. Bila ada ahli waris lain yang mewarisi secara *dzawil furudl* maka mereka mengambil sisa harta yang ditinggal⁷¹.

⁷¹ *Ibid*, h. 244-246

c. *Asabah Ma'a Ghair*

Yang berhak menjadi ahli waris *asabah ma'a ghair* adalah:

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih), atau bersama dengan perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih)⁷².

Ahli waris *asabah ma'al ghair* mendapatkan sisa harta peninggalan setelah pembagian *ashabul furudl*. Jadi, manakala harta peninggalan setelah pembagian *ashabul furudl* dan ahli waris lainnya tidak tersisa, maka ahli waris *asabah ma'al ghair* tidak mendapat bagian⁷³.

3. Ahli waris *Dzawil Arham*

Adapun ahli waris kelompok *Dzawil Arham* itu adalah:

- a. Kerabat garis keabawah, yaitu semua keturunan yang hubungannya kepada pewaris melalui perempuan, seperti anak laki-laki maupun anak perempuan dari anak perempuan atau anak dari cucu yang perempuan.
- b. Kerabat garis keatas (leluhur) yang hubungannya kepada pewaris melalui perempuan, seperti ayah dari ibu dan dan seterusnya keatas.

⁷² Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 62

⁷³ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 79

- c. Kerabat garis kesamping pertama, yaitu anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara seibu.
- d. Kerabat garis kesamping kedua, yaitu saudara seibu dari ayah, saudara perempuan dari ayah kandung atau seayah, anak perempuan dari paman serta keturunannya, dan saudara dari ibu dalam segala bentuknya.
- e. Kerabat garis kesamping ketiga, yaitu saudara kakek atau nenek sebagaimana yang berlaku pada ayah atau ibu.
- f. Ulama yang mengakui adanya ahli waris *Dzawil Arham* sepakat menetapkan bahwa adanya hak kewarisan *dzawil arham* itu bila tidak ada ahli waris *asabah* dan bila ada sisa harta yang ada, tidak ada sisa harta seacara *radd*. Misalnya ahli waris yang ada hany suami atau istri yang tidak dapat menerima *radd*⁷⁴.

⁷⁴ Hajar M, *Op. Cit*, h. 94-95

BAB III

IMAM MALIK DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi

Malik lahir di sebuah kota yang namanya Darul Hijrah. Darul Hijrah itu adalah negeri tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian dinamakan Al-Madinah An-Nabawiyah atau dikenal dengan kota Al-Madinah. Kota tersebut terkenal sebagai kota termulia kedua di dunia setelah Al-Makkatul Mukarramah. Di kota inilah yang menjadi pusat ahli hadist⁷⁵.

Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn'Umar bin Al-Haris (93H-179H)⁷⁶. Datuk yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi'in gelarnya ialah Abu Anas. Diceritakan dari Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan bin Thabir semoga Allah melimpahkan keridhaan-Nya atas mereka semua, datuk Imam Malik adalah seorang dari yang empat yang ikut menghantarkan dan mengebumikan Utsman bin Affan, datuknya termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Qur'an semasa Khalifah utsman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci Al-Qur'an. Sejarah Anas bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah, apa yang diketahui beliau tinggal

⁷⁵ M.T. Hasbi Ash shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 141

⁷⁶ Malik bin Anas , *Muwaththa*, (Beirut:Darul Fikr, 1989), h.5

disuatu tempat yang bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir disebelah utara Al-Madinah. Bapak Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadist-hadist Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya⁷⁷.

Imam Malik disuatu tempat yang bernama Zulmarwah disebelah Utara Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di Al-Akik buat sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah⁷⁸.

Jika dilihat silsilah keturunan Imam Malik di atas, mereka adalah termasuk orang yang ‘alim dan banyak menghafal hadits-hadits Nabi Saw.

Dalam satu riwayat bahwa beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun dan dilahirkan dikalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadits dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadist Nabi Saw dan *Atsar*⁷⁹. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh sebab itu, Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan sebagai problematikanya⁸⁰.

⁷⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 72-73

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Zulfran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 224

⁸⁰ Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, terjemahan, Husain Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986), Cet-I, h. 20

Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya meskipun harus berseberangan dengan paham kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al- Mansur dari Bani Abbasiyyah di Baghdad⁸¹.

Tidak ada sejarah hidup anak manusia yang mulus tanpa aral melintang serta asam garam dan pahit getirnya hidup perjalanan di dunia ini. Lebih-lebih lagi perjalanan hidup orang besar, seperti para Nabi dan para Rasul, juga para Sahabat beliau dan kemudian para Ulama' *auliya'ullah* (kekasih Allah). Demikian pula kehidupan yang dijalani Imam Malik bin Anas.

Sepanjang riwayat, ketika Imam Malik berusia 54 tahun dikala itu pemerintahan Islam di tangan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang beribu kota di Baghdad dan selaku gubernur di Madinah sebagai wakil kepala Negara yakni Ja'far bin Sulaiman Al-Husyimy⁸².

Diantara sebagian pendapat ahli sejarah yang tertera ialah beliau azab karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang dipaksa, hal ini berlandaskan dari sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءَ وَالسَّيِّئَاتِ وَمَا اسْتَكْرَهُ هُوَ عَلَيْهِ.

⁸¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h.105

⁸² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 109

Artinya: “Dari Abu Zar al-Ghifari ra. Berkata: berkata Rasulullah. Sesungguhnya Allah melewati hukuman terhadap hambanya itu bersalah, lupa dan k arena sesuatu yang dipaksakan kepadanya”⁸³.

Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang menjatuhkan talak karena dipaksa maka tidak jatuh talaknya, dengan demikian Khalifah Ja'far bin Sulaiman al-Husyimy tidak suka mendengar hadits tersebut disebabkan karena hadis ini dijadikan sebagai hujjah bagi musuh beliau, karena dengan hadist tersebut pihak musuh akan menolak perjanjian (bai'ah) pelantikan Ja'far lantaran mereka dipaksa.

Ja'far bin Sulaiman al-Husyimy pernah melarang Imam Malik supaya tidak menggunakan hadits yang tersebut diatas. Imam Malik tidak mau menuruti perintah oleh karena itu beliau disiksa⁸⁴. Beliau juga pernah menyuruh beberapa orang utusan untuk menanyakan pendapat Imam Malik tentang permasalahan tersebut. Imam Malik memberikan pendapatnya dengan berterus terang dan hal ini disaksikan oleh beberapa orang yang diutus oleh Ja'far lantaran itu beliau memerintahkan supaya menangkap, dan memukulnya sebanyak tujuh puluh rotan sehingga beliau terjatuh.

Setelah berita penyiksaan terhdap Imam Malik diketahui oleh penduduk Madinah maka banyak diantara mereka yang keluar berontak sebagai bantahan terhadap perbuatan yang kejam itu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berduka cita atas penyiksaan terhadap Imam Malik. Mereka mersa

⁸³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), h. 642

⁸⁴ Ahmad Syurbasi, *Op.Cit*, h.96

ragu dengan apa yang telah baru terjadi karena beliau sangat menghormati Imam Malik⁸⁵.

Imam Malik meninggal pada hari Ahad, tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah⁸⁶, beliau meninggalkan empat orang anak yang shlih-shalihah yakni Yahya, Muhammad, Hammad dan Ummul Baha'.

B. Pendidikan dan Karya Imam Malik

1. Pendidikan

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-alama Madinah, di antaranya para *tabi'in*, para cerdik pandai, dan para ahli hukum agama.

Imam Malik mula-mula belajar membaca al-Qur'an dan menghafalnya, sehingga dalam usia remaja ia telah hafal al-Qur'an, baru kemudian ia belajar hadits dan menghafalnya. Permintaan Malik bin Anas kepada ibunya untuk mengunjungi majlis pengajian para ulama, dibolehkan bahkan dengan senang hati ibunya menyuruh Malik bin Anas untuk mendatangi ulama Rabi'ah (wafat tahun 136 H) untuk belajar⁸⁷.

Diantara guru-gurunya adalah Abd. al-Rahman ibn Hurmuz Al-'Araj, Imam Malik pernah berguru kepadanya selama lebih kurang tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. I Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Malik bin Anas, *Loc.Cit*

⁸⁷ Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura-Jeddah: Al-Haramain,tt), h. 239

Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan kepada mereka yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan Syekh itu satu hari penuh⁸⁸.

Diantara guru Imam Malik adalah ‘Abd al- Rahman ibn Hurmuz, Nafi’ Maula ibn ‘Umar, dan Ibn Syihab al-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqih Islam adalah Rabi’ah ibn ‘Abd al-Rahman atau dikenal dengan Rabi’ah al-Ra’y.

Ibn Syihab al-Zuhri adalah salah seorang ahli fiqih dan ahli hadits. Pada zamannya, dialah ulama yang paling mengetahui Sunnah. Dalam *al-Muwaththa’* Imam Malik meriwayatkan 132 hadits dari Ibn Syihab, sedangkan dari Nafi’ Maula ibn ‘Umar, yang terkenal sebagai ahli hadits, Imam Malik meriwayatkan 82 hadits⁸⁹.

Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-mula Imam Malik menghafal sunnah, atsar, dan fatwa-fatwa sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada usia yang sanagt muda, Imam Malik minta izin kepada ibunya untuk mengikuti pengajian para ulama. Saat itu ibunya yang bernama Alamiyah binti Sarik al-Azdiyah memilihkan baju terbaru dan memasang surban dan ibunya berkata:

⁸⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h.76

⁸⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 79-80

“pergilah kepengajian Rabi’ah ibn Abd. Al-Rahman dan tulislah apa yang kamu dapati darinya”. Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak kecil Imam Malik gemar mencari ilmu. Bahkan sering pula terjadi sepulang pengajian, Imam melewati pepohonan rindang sambil menghafal yang ia dapati dari pengajian. Ketika saudarnya melaporkan kebiasaan Imam Malik kepada ayahnya, ayahnya berkata: “biarkan ia menghafal hadits-hadits Nabi Saw”⁹⁰.

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negeri Madinah dan tahu kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para ulama untuk duduk dikursi fatwa. Imam Malik Berkata, “saya tidak duduk dikursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh Syeikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu”⁹¹.

2. Karya-Karya Imam Malik

Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan ilmu yang beliau dapatkan, melahirkan kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam waktu itu hingga sekarang.

Diantara karya-karya Imam Malik tersebut adalah Kitab *al-Muwaththa'*, merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadits-hadits shahih, perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, Malik *Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhi wa fiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1952), Cet. Ke-2, h. 25

⁹¹ Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', *Terjemahan, Nadirsyah Hawari*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 180

disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh. Keistimewaan dari kitab *Al-Muwaththa'* adalah bahwa Imam Malik merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang diambil dari hadits-hadits dan *atsar*. Kitab yang disusunnya selama empat puluh tahun ini sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif dibidang hadits dan fiqh. Sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik pada masa itu⁹².

Adannya aspek hadits dalam kitab ini, adalah karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw atau dari sahabat dan Tabi'in. hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam)⁹³.

Imam Malik mengumpulkan sejumlah besar hadits dalam kitabnya *al-Muwaththa'* itu kemudian memilihnya selam bertahun-tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan, bahwa Imam Malik dalam Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* telah mengumpulkan 4000 buah hadits. Hadits-hadits itu dipilih oleh Imam Malik setiap tahun, mana yang lebih sesuai untuk kaum muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran.

⁹² Farouq Abu Zaid, *Op.Cit*, h. 23

⁹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 117

Adapun yang dimaksud kandungan dari aspek kitab Fiqih, adalah karena *al-Muwaththa'* disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh. Ada bab kitab Thaharah, kitab Shalat, kitab Zakat, kitab Syiam, kitab Nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa pasal, yang setiap pasal-pasalnya mengandung pasal-pasal yang hamper sejenis, seperti pasal shalat jama'ah, shalat safar dan seterusnya.

Demikian Kitab *al-Muwaththa'* adalah kitab yang menuat hadits da fiqh, kehadiran kitab ini telah membuka cakrawala berfikir umat terhadap bagaimana cara menulis sunnah, kemudian mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang minta riwayat hadits dari Imam Malik. Melihat sambutan yang sangat semarak itu, al-Manshur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai daerah. Namun Imam Malik melarangnya, sebab para sahabat menyebar di mana-mana dan mereka meriwayatkan suatu hadits yang tidak dirwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz dipegang oleh Imam Malik⁹⁴.

Diantara karya Imam Malik adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fawa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furatal-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn al-Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik, dan pernah mendengar *al-Muwaththa'* dari Imam Malik kemudian ia pergi ke Irak. Asad ibn al-Furat bertemu dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan

⁹⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Op. Cit*, h. 184

Muhammad. Ia banyak dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan disana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika di Irak, dinyatakan kepada murid-murid Imam Malik yang ada di Mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut⁹⁵.

C. Pemikiran Imam Malik

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menulis dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik, kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran yang sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa isyarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa dan lebih-lebih dalam kitabnya *al-Muwaththa'*. Dalam *al-Muwaththa'* Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa ia mengambil “tradisi orang-orang Madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur’an dan al-Sunnah, serta mengambil hadits *munqati*⁹⁶ dan *mursal*⁹⁷ sepanjang tidak bertentangan

⁹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 119

⁹⁶ Hadits *Munqati*’ yaitu terjadinya keputusan *sanad* pada generasi sebelum sahabat dan tidak secara berturut-turut, apabila keputusan *sanad* tersebut lebih dari satu orang perawi.

⁹⁷ Hadits *Mursal* yaitu hadits yang diangkat oleh *tabi’in* kepada Rasul Saw dari perkataan atau perbuatan dan *taqrir* beliau.

dengan tradisi orang-orang Madinah⁹⁸. Qadhi ‘Iyadh mengungkapkan bahwa cara Imam Malik dalam mengambil hukum adalah senantiasa menngutamakan ayat-ayat al-Qur’an dalam menyusun dalil-dalinya yang jelas, memulai dengan nashnya, kemudian zahirnya lalu mafhumnya. Setelah itu barulah Imam Malik beralih kepada hadits, dengan mengutamakan hadits *mutawatir*⁹⁹, lalu *masyhur*¹⁰⁰, dan barulah ia menggunakan hadits *ahad*¹⁰¹. Dengan cara yang tertib sebagaimana ia mengambil hukum dari al-Qur’an. Setelah al-Qur’an dan hadits, barulah Imam Malik berpindah kepada ‘*Ijma*’. Apabila dalam sumber-sumber pokok itu tidak menjumpai pemecahannya, barulah beliau menempuh jalan *qiyas* yang dijadikan sandaran untuk menyimpulkan suatu hukum¹⁰².

Begitu pula al-Qurafi dalam kitabnya Tanqih al-Ushul menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Imam Malik adalah *al-Qur’an*, *al-Sunnah*, *Ijma*’, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul sahabat masalah mursalah*, ‘*urf*, *sad al-dzara’I*, *istihsan* dan *istishab*¹⁰³.

Namun secara jelas, akan penulis gambarkan pemikiran Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam, dimana beliau berpegang kepada:

⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, h. 215

⁹⁹ Hadits *Mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan sepakat untuk melakukan berdusta, (yang diterimanya) dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai kepada akhir sana, dengan syarat tidak rusak (kurang) jumlah perawi tersebut pada seluruh tingkatan sanad.

¹⁰⁰ Hadits *Masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan *sanad*, selama tidak sampai kepada tingkatan *mutawatir*.

¹⁰¹ Hadits *Ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat hadits *mutawatir* atau hadits *masyhur*.

¹⁰² Muhammad Ali al-Sayis, *Nash-ah al-Fiqh al-ijtihadi wa arwaruhu*, (tt : Majmu’ al Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 96

¹⁰³ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h. 28

1. Al-Qur'an

Imam Malik melatakkannya di atas segala dalil, didahulukan dari pada sunnah karena Al-Qur'an merupakan sumber syari'at sampai hari kiamat.

2. Sunnah

Sunnah menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Manhaj Imam Malik dalam meng-*istinbath* hukum dari sunnah adalah mengambil hadits *mutawatir*, hadits *masyhur* dizaman *tabi'in* atau *tabi' tabi'in*, dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan *khbar ahad* walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.

3. *Ijma' Ahl al-Madinah*

Imam malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (*amal Ahl al-Madinah*), apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Madinah adalah tempat Rasulullah Saw berhijrah dari Mekkah, disitu beliau lama berdomisili menyampaikan agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah Saw dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat dan mereka adalah anak didik langsung Rasulullah Saw. Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi dari Rasulullah Saw, dan sterusnya praktek-praktek keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan sterusnya sampai kepada Imam Malik. Dengan demikian, praktek penduduk Madinah yang disepakati atau praktek mayoritas

penduduk Madinah dianggap sebagai kritalisasi dari ajaran Rasulullah Saw sehingga harus dijadikan sumber hukum.

Dikalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khbar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khbar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-Madinah* ada beberapa tingkatan:¹⁰⁴

- a) Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *al-naql*, yakni hasil dari mencontoh Rasulullah Saw, bukan dari hasil *ijtihad ahl al-Madinah*.
- b) Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada *amalan ahl al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.
- c) *Amalan ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang sering bertentangan. Artinya, apabila dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu kedua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh amalan *ahl al-Madinah* itulah yang menjadi hujjah menurut Mazhab Maliki.
- d) *Amalan ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw, *amalan ahl al-Madinah* seperti bukan hujjah, baik

¹⁰⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 107

menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama dikalangan mazhab Maliki.

4. Fatwa Sahabat

Imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah hadits yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari para Khulafa ar-Rasyidin jika memang tidak ada nash dalam masalah tersebut. Yang dimaksud sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwakecuali atas dasar apa yang difahami oleh Rasulullah Saw.

5. *Khabar Ahad*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai suatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*.

6. *Qiyas*

Imam Malik menggunakan *qiyas* dengan maknanya menurut istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada *nash*-nya dengan masalah yang sudah ada *nash*-nya karena ada persamaan dalam aspek *illat*-nya. Contohnya dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak pernah disebutkan haramnya *nabiz* dan minuman keras lainnya selain *khamar* seperti alkohol dan lainnya, maka Imam Malik dan jumhur ulama menetapkan haramnya itu dengan mengqiyaskan kepada *khamar* yang

ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat 90, yang artinya, “sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan , maka jauhilah...”

7. *Al-Istihsan*

Istihsan menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah *qiyas*, menurut mazhab Maliki, *al-Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambill masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal mursial* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Contohnya adalah Allah melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada dan mengadakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, namun Dia memberikan kemurahan secara *istihsan* pada *salam* (pemesanan), sewa-menyewa, *muzara'ah*, dan lain senagainya. Semua contoh itu adalah akad, sedangkan sesuatu yang diakadkan yang tidak ada pada saat akad berlangsung. Segi *istishsan*-nya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka.

8. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah yaitu merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian

maka *masalah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan tujuan syari'at diturunkan¹⁰⁵.

Para ulama berpegang kepada *masalah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *masalah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *masalah* yang bersifat umum, bukan sekedar *masalah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *masalah* tersebut harus merupakan *masalah* bagi kebanyakan orang.
- c) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *masalah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dan *ijma'*.

9. *Sadd al-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

10. *Istishab*

Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah, tetapnya suatu ketentuan hukum

¹⁰⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1096

untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.

11. *Syar'u man Qablana Syaru'un lana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *Syar'u man Qablana Syaru'un lana* sebagai dasar hukum. Menurut Abdul Wahab. Bahwa apabila al-Qur'an dan as-Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat yang sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitu juga sebaliknya.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan dari fakultas *ahl al-hadits* yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas* misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa Imam Malik mendahulukan “perbuatan-perbuatan orang Madinah “ dari pada penggunaan *qiyas*. Sampai sejauh ini, Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas, Ibn Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya mengatakan Imam Malik mengaku, dalam lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadits sedemikian rupa, sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada *nash* yang jelas¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Farouq Abu Zaid, *Op.Cit*, h. 23

Pemikirannya dalam hal hukum kewarisan Islam dapat ditinjau dalam bukunya yang berjudul *al-Muwaththa'* (1989), dan *Mudawwanah al-Qubra* (tt) yang menguraikan tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah. Hal ini disebabkan oleh pemahamannya terhadap *atsar* yang berkaitan dengan talak *maridl* yang diselesaikan oleh Utsman bin Affan yakni kasus yang menyangkut isteri Abdurrahman bin Auf. Bahwasannya Abdurrahman bin Auf menceraikan isterinya dengan talak *ba'in* ketika ia sedang sakit keras lalu Utsman bin Affan menjadikan isterinya sebagai salah satu pewaris ketika telah habis masa iddahanya.

Atsar tersebut berbunyi, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لَكَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ، وَ
كَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُمَانُ بْنُ عَقَّانٍ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ
عِدَّتِهَا.

Artinya: “ Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibn Syihab, dan dari Thalhahbin Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwasannya Abdurrahman bin Auf mentalak tiga istrinya, saat itu Abdurrahman sedang sakit. Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan darinya setelah habis masa iddah”.¹⁰⁷

Hal ini tertuang didalam kitab *Mudawwanah al-Qubra* dan *al-Muwaththa'*.

¹⁰⁷ Malik bin Anas, *Op. Cit*, h. 364

BAB IV
HAK ISTERI YANG HABIS MASA IDDAH
MENURUT IMAM MALIK

A. Pemikiran Imam Malik

Salah satu adanya penyebab hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan¹⁰⁸. Hubungan perkawinan yang dimaksud adalah dapat saling waris-mewarisi antara suami dengan isteri yang masih dalam ikatan perkawinan¹⁰⁹.

Ikatan perkawinan sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan itu berlangsung sejak akad yang berupa ijab dan kabul tersebut mulai diucapkan sampai dengan saat diputuskannya akad¹¹⁰. Dengan demikian suami dapat menjadi ahli waris bagi isteri, dan isteri dapat pula menjadi ahli waris bagi suami¹¹¹.

Secara umum isteri yang sudah di talak adalah bukan sebagai isterinya lagi, atau dengan kata lain hubungan perkawinan antara suami-isteri sudah terputus atau hilang. Sementara salah satu sebab dari saling mewarisi adalah adanya hubungan perkawinan.

Menurut Imam Malik bahwa isteri yang sudah habis masa iddah dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, baik ketika suami

¹⁰⁸ Hajar M, *Op.Cit* , h. 17

¹⁰⁹ A. Sukris Samardi, *Op.Cit*, h.27

¹¹⁰ Fathur Rahman, *Op.Cit*, h. 20

¹¹¹ Ali Parman, *Op.Cit*, h. 62

meninggal isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah berakhir masa idddahnya¹¹², baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain ataupun belum¹¹³. Dalam hal ini isteri tetap mendapatkan hak waris secara mutlak dari suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan iddah wafat atau iddah talak pada isterinya. Pernyataan Imam Malik tersebut sebagai berikut:

وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ فَهَلْكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا عِدَّةٌ عَلَيْهَا مِنَ الْوَفَاةِ.¹¹⁴

“Dan jika iddah talak perempuan tersebut telah selesai, lalu laki-laki tersebut meninggal saat itu juga (setelah iddah perempuan yang ditalaknya tersebut telah selesai) maka perempuan tersebut punya hak waris dan tidak ada iddah wafat baginya.”

Pernyataan yang di kemukakan oleh Imam Malik yang berkaitan dengan hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah, hal ini di sandarkan pada *atsar* yang berbunyi, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ، وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عُفَّانٍ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.¹¹⁵

Artinya: “Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibn Syihab, dan dari Thalhahbin Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang

¹¹² Imam Malik Bin Anas, *Op.Cit*, h. 86

¹¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 478

¹¹⁴ Imam Malik Bin Anas, *Op.Cit*, h. 86

¹¹⁵ Malik Bin Anas, (*Al-Muwaththa'*), *Op. Cit*, h. 364

yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwasannya Abdurrahman bin Auf mentalak tiga istrinya, saat itu Abdurrahman sedang sakit. Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan darinya setelah habis masa iddah”.

Berdasarkan *atsar* diatas pendapat Imam Malik dalam kitabnya *Al-Mudawwanah* dan *Al-Muwaththa'* yang menyatakan bahwa isteri yang telah habis masa iddah mendapat hak waris, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum, hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:

Pertama, jatuhnya talak itu pada waktu keadaan sakit (*talaqul maridl*).

Dalam hal ini talak *maridl* adalah talak *ba'in* yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit dan kemudian meninggal akibat sakit tersebut. Talak *maridl* merupakan sebuah permasalahan dalam hukum Islam yang tidak mempunyai dasar hukum langsung baik itu dari nash al-Qur'an maupun Hadits. Kasus semacam ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan Kekhalifahan saat itu dipegang oleh Usman bin Affan.

Adapun dalam Kitab *Al-Mudawwanah* dan *Al-Muwaththa'* yang berkaitan dengan hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah yang sebagian besar disandarkan kepada kasus talak *maridl* yang diselesaikan oleh Usman bin Affan yakni kasus yang menyangkut istri Abdurrahman bin Auf.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyyah, bahwa imamiyah mengatakan: apabila seorang suami mentalak isterinya disaat suami sedang berada dalam keadaan sakit menjelang mati, baik talaknya itu *raj'i* atau talak *ba'in*, seperti talak tiga, talak terhadap wanita yang belum dia campuri, dan

talak terhadap wanita-wanita yang telah memasuki masa menopause, lalu laki-laki itu meninggal dunia sebelum satu tahun sejak jatuhnya talak tersebut, maka wanita tersebut berhak mewarisinya dengan tiga syarat:

- a. Kematian laki-laki tersebut disebabkan oleh sakit yang terjadi saat dia menjatuhkan talak kepada isterinya itu
- b. Wanita tersebut belum kawin lagi dengan laki-laki lain
- c. Talak tersebut dijatuhkan bukan atas permintaan wanita tersebut¹¹⁶.

Alasan, *Kedua*, karena wanita merupakan makhluk yang lemah, maka ia harus dilindungi hak-haknya, untuk itu isteri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit tetap mendapat hak waris, karena suami yang dalam keadaan sakit kemudian mentalak isterinya mungkin saja suami punya niat jahat agar isterinya tidak mendapatkan warisan, untuk menghindari niat jahat suami maka dalam hal ini isteri tetap mendapatkan warisan meskipun iddahnya telah habis¹¹⁷, baik isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum¹¹⁸. Untuk itu isteri yang ditalak *ba'in* oleh suami yang sedang sakit tetap mendapat warisan, karena dikhawatirkan isteri yang tidak mendapat warisan tersebut hidupnya nanti akan menderita karena itu isteri pantas menerima warisan¹¹⁹.

¹¹⁶ Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, h. 580

¹¹⁷ Malik bin Anas, *Op. Cit*, 86

¹¹⁸ Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, h. 478

¹¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 586-588.

Sebagaimana terkandung dalam hadis yang diriwayatkan Imam Turmudzi, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَغَارٍ رِيسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولًا لَهُ فَأَنكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَهَيَّيْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . (رواه الترمذی)¹²⁰

Artinya: "Telah bercerita kepadaku Qitaibah, dari Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya telah ditemukan seorang perempuan di sebagian peperangan Nabi Muhammad SAW. Terbunuh kemudian Nabi Inkar dan melarang membunuh wanita dan anak-anak". (H.R. Imam Turmudzi)

Bahwasannya wanita dan anak-anak dalam peperangan walaupun ia non Muslim dilarang untuk dibunuh karena mereka tergolong mahluk yang lemah. Begitu juga dalam hal ini maka ia harus dilindungi hak-haknya untuk itu isteri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit tetap mendapatkan hak waris, karena mungkin saja suami punya niat jahat agar isterinya tidak mendapatkan warisan, untuk menghindari maksud jahat suami, maka isteri tetap mendapat warisan meskipun iddahnya telah habis atau sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maupun belum¹²¹.

Sedangkan kedudukan isteri kalau sudah dijatuhi talak, maka statusnya bukan isteri lagi. Kedudukan isteri dalam hal talak *raj'i* dapat dirujuk kembali dalam masa iddah, kalau dalam talak *ba'in* isteri tidak dapat dirujuk kembali bilamana sebuah talak setelah jatuh maka segala hukumnya berlalu, dengan

¹²⁰ Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Semarang : Toha Putra, , tt), Juz III, h. 66.

¹²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), jilid 8, h. 73

demikian hubungan antara suami dengan isteri telah putus segala konsekuensinya, baik itu hubungan pernikahan maupun hubungan keawarisan.

Dalam hal tetapnya ahli waris bagi isteri yang habis masa iddah, dalil yang digunakan Imam Malik yaitu *saddud dzari'ah*, yakni menghambat sesuatu yang menjadi sebab kerusakan¹²². Imam Malik terkenal banyak menggunakan landasan *saddud az-zari'ah* dalam membentuk mazhabnya¹²³. Menurutny, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya¹²⁴.

Salah satu contoh dari fatwanya yaitu seorang isteri yang ditalak *ba'in* ketika suaminya sedang sakit keras (talak *maridl*) kemudian ia tetap mendapatkan hak waris dari suami yang menceraikannya, meskipun masa iddahny telah habis sebelum suaminya tersebut wafat. Imam Malik beralasan, tindakan suami yang menceraikan isterinya waktu sakit patut diduga kemungkinan suami ingin menghindar dari aturan waris dengan harapan isterinya tidak mendapat hak waris¹²⁵.

Untuk mencegah anggapan demikian maka isteri yang telah diceraikannya tetap mendapatkan hak waris, karena jika benar ada niat suami untuk menghilangkan hak waris isteri dengan cara menceraikannya diwaktu sakit keras yang menyebabkan kematian padanya (suami) maka hal ini tidak tepat dan sangat tidak adil bagi kaum perempuan. Hal ini sesuai dengan dalil

¹²² Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Op. Cit*, h. 39

¹²³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 72-73.

¹²⁴ Farouq Abu Zaid, *Op. Cit*, h. 23

¹²⁵ *Ibid.*

yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan hak waris bagi isteri yang habis masa iddah yaitu *saddud dzari'ah*, yakni menghambat sesuatu yang menjadi sebab kerusakan.

B. Hak Waris Isteri yang Habis Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam

Menurut Imam Malik bahwa isteri yang habis masa iddah dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, baik ketika suami meninggal isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah berakhir masa iddahannya¹²⁶, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain ataupun belum¹²⁷. Dalam hal ini isteri tetap mendapatkan hak waris secara mutlak dari suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan iddah wafat atau iddah talak pada isterinya. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama, sebagai berikut:

Adapun menurut *Ijma'* ulama, jika talaknya talak *ba'in* (tidak dapat kembali) dan jatuh disaat penalakanya dalam keadaan sehat, talak seperti ini dapat menghalangi hak waris-mewarisi. Dengan demikian isteri yang ditalak oleh suaminya, dalam kondisi seperti ini, tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Karena putusanya ikatan perkawinan sejak talak dijatuhkan. Demikian pula suami, tidak dapat mewarisi harta peninggalan isteri, jika isteri yang meninggal dunia dalam kondisi yang seperti ini, karena

¹²⁶ Imam Malik Bin Anas, *Op.Cit*, h. 86

¹²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, h. 478

sebab yang sama yaitu putusnya ikatan perkawinan sehingga hak waris mewarisi menjadi hilang¹²⁸.

Jika talaknya *ba'in* dan jatuh pada saat penalaknya dalam keadaan sakit keras, dimana dia tidak bermaksud menghilangkan hak waris isterinya, maka juga tidak dapat saling mewarisi. Para ulama sepakat dalam kondisi yang demikian, tidak dapat saling mewarisi diantara keduanya karena suami tidak ada bermaksud untuk menghilangkan hak mewarisi isterinya. Akan tetapi, jika suami ada maksud untuk menghilangkan hak mewarisi isterinya, maka isteri tetap mendapat hak waris dari suami yang telah menceraikannya¹²⁹.

Menurut kalangan Syafi'yyah, isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak karena sebelum kematian suami, talak yang dijatuhkan sudah talak *ba'in*, sehingga hak mewarisi menjadi putus, seperti halnya talak dalam keadaan sehat¹³⁰. Isteri hanya akan mendapatkan hak waris ketika iddah tersebut masih ada dan apabila iddahnya telah habis maka wanita itu telah menjadi wanita lain yang tidak lagi berhak menerima waris¹³¹.

Menurut kalangan Hanafiyyah, isteri dapat mewarisi harta peninggalan suami ketika mantan suaminya meninggal dunia selama ia masih dalam masa iddah. Namun, jika mantan suaminya meninggal dunia sedangkan masa iddahnya sudah berakhir, isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan

¹²⁸ Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Op. Cit*, h. 37

¹²⁹ *Ibid*, h. 37-38

¹³⁰ Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Op. Cit*, h. 38

¹³¹ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 505

suami. Sebab, dalam masa iddah, tali perkawinan masih dianggap utuh. hal inilah yang disamakan dengan talak *raj'i*¹³².

Menurut kalangan Hambaliyyah, isteri tetap dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, baik ketika suami meninggal dunia isteri masih dalam masa iddah maupun telah selesai masa iddah, dan selama isteri belum menikah dengan laki-laki lain atau murtad¹³³.

Dalam hal ini Ibn Hazm berkata, talak orang sakit sama hukumnya dengan talak orang sehat. Tidak ada perbedaan, apakah mati karena sakitnya itu atau tidak, jika yang sakit menjatuhkan talak sebanyak tiga kali atau talak yang ketiga kalinya atau sebelum bersetubuh lalu ia mati atau bekas isterinya mati sebelum iddah habis atau sesudah iddah habis, atau dalam talak *raj'i* sedang bekas suami tidak merujuknya sampai ia mati atau bekas isterinya mati sesudah iddahnya habis maka bekas isterinya sama sekali tidak mendapat hak waris.¹³⁴

Sedangkan pendapat Imam Malik didalam kitabnya *Al-mudawwanah* dan *Al-Muwaththa'* yang menyatakan bahwa wanita tersebut mendapatkan warisan, walau sudah habis masa iddah¹³⁵, baik sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum¹³⁶.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 75

¹³⁵ Malik bin Anas, (*Mudawwanah Qubra*), *Op. Cit*, h. 86

¹³⁶ Sayid Syabiq, *Op. Cit*, h. 73

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perselisihan tentang keharusan diterapkannya *Saddud Dzari'ah*. Ini dikarenakan talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sakit diprasangkai untuk menghalangi bagian pusaka yang seharusnya didapat oleh istri kalau akad perkawinannya masih utuh¹³⁷.

Dalam permasalahan ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak menggunakan *Saddud Dzari'ah* dalam berpendapat tentang tetapnya ahli waris bagi istri yang telah ditalak oleh suami ketika suami dalam keadaan sakit dan habis masa iddahnya, alasan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i karena istri hanya boleh mendapatkan waris apabila masih dalam masa iddah akan tetapi apabila iddah tersebut telah habis maka istri tersebut tidak lagi mendapat warisan dikarenakan iddahnya telah habis.

Oleh karenanya, fuqaha yang memegang dalil *saddud dzari'ah* menetapkan bagian warisan isteri tersebut, sedangkan fuqaha yang tidak memegang dalil *saddud dzari'ah* berpendapat bahwa talaknya terjadi, mereka tidak menetapkan hak mewarisi bagi isteri tersebut.

Saddud dzari'ah merupakan dasar dalam fiqih Islam yang dipegang oleh seluruh fuqaha, tetapi mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Imam Malik berpegang pada *Saddud dzari'ah*. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak seperti Imam Malik walaupun mereka tidak menolak *Saddud dzari'ah* secara keseluruhn dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri.

¹³⁷ *Ibid.*

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, *Saddud dzari'ah* ini masuk kedalam dasar yang mereka tetapkan yaitu *qiyas* menurut Imam Syafi'i dan *Istihsan* menurut Imam Abu Hanifah. Namun berpegang kepada *Saddud dzari'ah* tidak boleh berlebihan karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya *mubah*, *mandub* bahkan wajib, karena khawatir terjerumus dalam jurang *kedzaliman*.

Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar Mazhab Maliki : *Pertama*, Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan-perbuatan orang Madinah, menurut Imam Maliki, termasuk dari bagian sunah mutawatir karena pewarisanya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal, sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi SAW, dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW yang kemudian diwariskan kepada *tabi'in* dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada *tabi' tabi'in* (generasi sesudah *tabi'in*)¹³⁸.

Kedua, qaul sahabat. Imam Maliki juga menanggapi qaul sahabat sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan dari pada *qiyas*. Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma'sum*,

¹³⁸ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 97

sedangkan yang tidak ma'sum tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah¹³⁹.

Seperti permasalahan tentang isteri yang sudah habis masa iddah dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, baik ketika suami meninggal isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah berakhir masa iddah¹⁴⁰, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain ataupun belum¹⁴¹. Dalam hal ini isteri tetap mendapatkan hak waris secara mutlak dari suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan iddah wafat atau iddah talak pada isterinya. Imam Malik berpendapat demikian karena dalam permasalahan isteri yang telah ditalak dan habis masa iddah¹⁴²nya tidak ditemukan nash al-Qur'an atau pun Hadits mengingat permasalahan tersebut ada dalam perbuatan sahabat yaitu pada masa khalifah Usman bin Affan, maka wajar apabila Imam Malik menggunakan pendapat ini sebagai dalil, yaitu mengenai *atsar* dari istri Abdur Rahman yang telah ditalak oleh Abdur Rahman ketika penjatuhan talak tersebut pada waktu suami dalam keadaan sakit.

*Ketiga, masalah mursalah*¹⁴², Teori masalah mursalah semula hanya dikenal dalam Mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua Mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat

¹³⁹ *Ibid.* h. 98

¹⁴⁰ Imam Malik Bin Anas, *Op.Cit.* h. 86

¹⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 478

¹⁴² *Maslahah Mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash al-quran dan sunnah, tetapi dirujukan pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari *nash-nash* Itu.

diketahui bahwa ternyata fiqih Mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapa pun sejauh masalahnya menyangkut fiqih, pasti mengandung unsure pemakaian rasio, seperti permasalahan mengenai pendapat Imam Malik tentang istri yang telah ditalak oleh suami ketika suami dalam keadaan sakit. Imam Malik berpendapat bahwa istri tersebut masih tetap mendapatkan waris walaupun istri tersebut telah habis masa iddahnya karena apabila istri tersebut tidak mendapatkan waris dikhawatirkan nanti hidup istri tersebut akan menderita dan juga ditakutkan nanti istri itu akan sengsara. Imam Malik berpendapat seperti ini dikarenakan mencerminkan nilai kemaslahatan yaitu *maslahah mursalah*, sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu mengambil *maslahat* serta sekaligus pula mencegah kerusakan¹⁴³.

Keempat, keteguhan Imam Maliki dalam memegang “tradisi orang-orang Madinah” lebih jelas lagi dalam penerimaan hadits *ahad*. Menurut Imam Maliki, suatu hadits *ahad* dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadits *Mutawatir*. Sedangkan hadits *Mutawatir* harus didahulukan dari *Qiyas*.

Mengenai *Atsar* Rabi’ah Ibn Abi ‘Abd ar-Rahman yang dijadikan dasar pendapat Imam Malik tentang istri yang talak dan habis masa iddahnya, talak tersebut adalah talak *ba’in* dan sedangkan penjatuhan talak tersebut pada waktu suami sakit. Riwayat yang berkaitan dengan *talak maridl* sebagian

¹⁴³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, Unisba), 1995, h. 100.

besar disandarkan kepada kasus *talak maridl* yang diselesaikan oleh Utsman bin Affan yakni kasus yang menyangkut istri Abdurrahman bin Auf.

Untuk itu menjadi penting kiranya untuk menguraikan tentang apakah *atsar* itu dan sejauh mana *atsar* dapat digunakan sebagai hujjah hukum. Kata *atsar* itu sendiri berarti bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan menurut istilah *atsar* sama dengan Sunnah, hadits dan *khbar* yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, *taqrir* maupun yang serupa¹⁴⁴.

Dari pengertian ini jelaslah bahwa *atsar* itu sama dengan hadits, sehingga kehujahan *atsar* sama dengan kehujahan hadits¹⁴⁵. Hanya saja yang menjadi persoalannya kemudian bagaimana *atsar* yang disandarkan kepada sahabat bukan kepada Nabi. Hal ini mengingat bahwa kedua *atsar* yang dipakai oleh Imam Malik merupakan *atsar* sahabat.

Dalam hal ini kita ketahui bahwa *atsar* sahabat muncul disebabkan karena Rasulullah telah wafat sehingga para sahabat tampil sebagai pengganti Rasulullah Saw. untuk memberikan fatwa, dari mereka telah keluar bermacam-macam fatwa, bahkan sebagian diantara tabi'in telah memperhatikan periwayatannya dan pentadwinannya, sehingga di antara mereka ada yang mengkodifikasikannya bersama sunah-sunah Rasul¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.33

¹⁴⁵ Fathur Rahman, *Ikhtishar Mustalakhul Hadits*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974), h. 13.

¹⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 144

Dalam ilmu hadits *atsar* sahabat juga biasa disebut dengan hadits *marfu'*, *mauquf'*, dan *maqtu'*. Hadits itu *marfu'* artinya hadits yang merupakan suatu perkataan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada nabi Muhammad S.A.W.¹⁴⁷ Hadits *mauquf'* artinya berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Adapun hadits *maqtu'* artinya adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari selain *tabi'in* serta di *mauquf* kan padanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak¹⁴⁸.

Hadits *mauquf'* dan *maqtu'* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah kecuali ada *qarinah* yang menunjukan kepada *mar'fu'*. Dan hadits *marfu'* itu sendiri dapat digunakan sebagai hujjah *hukmiyah*. Persoalannya kemudian adalah apakah *atsar-atsar* yang dijadikan dasar oleh Imam Malik tersebut merupakan *Atsar* yang *marfu'* atau tidak? Bila dilihat dari *atsar* yang dipakai oleh Imam Malik jelas bahwa *atsar* tersebut *marfu'* karena ada *qarinah* yang menghubungkan pendapat Imam Malik dengan perbuatan Utsman.

Berbicara mengenai *atsar* atau *fatwa sahabat* yang menjadi dasar hukum bagi ulama yang memberi hak waris yang mana hal tersebut lebih mencerminkan cita rasa keadilan dan kemaslahatan bersama. Disamping dilihat dari segi pembentukan hukum Islam itu sebenarnya adalah demi menjaga kemaslahatan. Tujuan-tujuan hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya manusia dari semua daya fitrahnya. Oleh karena itu tujuan hukum Islam pun adalah mengambil *maslahat* serta sekaligus mencegah kerusakan¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Fathur Rahman, *Op. Cit*, h. 134

¹⁴⁸ *Ibid.* h. 196-198

¹⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Op.Cit*, h. 100

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berpendapat, bahwasannya penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak karena sebelum kematian suami, talak yang dijatuhkan sudah talak *ba'in*, sehingga hak mewarisi menjadi putus, baik talak tersebut dijatuhkan dalam keadaan suami sehat maupun dalam keadaan sakit. Isteri hanya akan mendapatkan hak waris ketika iddah tersebut masih ada dan apabila iddahnya telah habis maka wanita itu telah menjadi wanita lain yang tidak lagi berhak menerima waris. Karena salah satu sebab saling waris-mewarisi antara seorang laki-laki dengan perempuan adanya hubungan perkawinan.

Ikatan perkawinan adalah sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan sesuai dengan syari'at Islam. Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling waris-mewarisi selama akadnya masih utuh. Apabila suami mentalak *ba'in* isterinya baik suami dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, maka secara otomatis hak untuk saling mewarisi diantara keduanya akan terputus, karena telah terputusnya ikatan perkawinan disebabkan oleh jatuhnya talak *ba'in*.

Adapun alasan penulis menolak pendapat Imam Malik tentang adanya hak waris secara mutlak bagi isteri yang habis masa iddah, baik sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum dikarenakan, apabila seorang isteri yang sudah ditalak oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya, ikatan antara suami dan isteri menjadi terputus dan hilang. Jadi, antara satu sama lain

tidak ada hubungan lagi salah satunya hubungan untuk saling waris-mewarisi diantara keduanya, apalagi setelah menikah dengan laki-laki lain. Tentu isteri berhak untuk memperoleh harta peninggalan dengan suami barunya jika suaminya meninggal pada saat ia masih berstatus sebagai isteri yang sah dan masih berada dalam masa iddah. Dan ia (isteri) tidak berhak lagi atas harta peninggalan mantan suaminya sama sekali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran Imam Malik, bahwa isteri yang sudah habis masa iddah tetap mendapat hak waris dari suami yang telah menceraikannya, baik sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum. Adapun alasannya, *pertama*, jatuhnya talak itu dalam keadaan sakit dikawatirkan adanya unsur kesengajaan dari suami ketika hendak mentalak isteri agar isteri tersebut tidak mendapat hak waris, *kedua*, bila isteri yang telah ditalak oleh suami dan telah habis masa iddah kemudian ia tidak mendapatkan hak waris maka dikhawatirkan bekas isteri tersebut hidupnya akan menderita dan sengsara karena wanita merupakan makhluk yang lemah dan harus dilindungi hak-haknya, oleh sebab itu isteri tetap mendapat warisan meskipun iddahnya telah habis, hal ini juga berdasarkan sebuah *atsar* yang menjelaskan kasus talak dalam keadaan sakit yang diselesaikan oleh Utsman bin Affan yakni kasus yang menyangkut istri Abdurrahman bin Auf.
2. Adanya hak waris isteri yang habis masa iddah, baik sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum hal ini tidak tepat. Karena salah satu sebab saling waris-mewarisi antara seorang laki-laki dengan perempuan adanya hubungan perkawinan.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan keadaan yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Islam untuk dapat memahami bahwasannya dengan putusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya masa iddah dalam talak *raj'i*, maka secara otomatis hubungan kewarisan menjadi terputus.
2. Diharapkan kepada para fuqaha dan cendikiawan muslim untuk selalu menelaah dan mengkritisi pemikiran mujtahid pada masa lalu, kemudian disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan zaman dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995)
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970)
- Al-Bukhari, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, alih Bahasa: Zainudin Ahmad az-Zubaidi, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), Jilid 2
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Semarang : Toha Putra, , tt), Juz III
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. 1
- _____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984)
- _____, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul Ali Art (J-ART), 2005)
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, terjemahan, Husain Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986), Cet-I
- Fathur Rahman, *Ikhtishar Mustalakhul Hadits*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974)
- _____, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1975)
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008)
- Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhatashar Kitab AL Umm fi Al Fiqh*, Penerjemah oleh: Muhammad Yasir dan Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbit Universitas Lppm, Unisba), 1995
- _____, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al- Azhar (Mesir), *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- M.T. Hasbi Ash shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Malik bin Anas, *Muwaththa*, (Beirut:Darul Fikr, 1989)
- _____, *Al-Mudawwanatul Qubro*, (Beirut: Darul Kitab al- Alamiyah, tt), Juz II
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Moh. Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Muhammad Ali al-Sayis, *Nash-ah al-Fiqh al-ijtihadi wa arwaruhu*, (tt : Majmu' al Buhus al-Islamiyah, 1970)
- Muhammad Abu Zahrah, Malik *Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1952), Cet. Ke-2
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa: Ahmad Taufik Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

- Muhammad Amin Suma, *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001)
- Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura-Jeddah: Al-Haramain,tt)
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', *Terjemahan, Nadirsyah Hawari*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980)
- Seri perundang-undangan, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinnjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kuasar, 1998)
- Zulfran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995)